PERAN BRIMOB POLRI DALAM PENGAMANAN PEMILU 2014: Kendala dan Tantangan •

Oleh:
Muradi♦

Abstract:
As part of the POLRI, the Police Mobile Brigade (Brimob hereafter) is actively involved in implementing any policy made by the POLRI, including to secure the 2014 election. Brimob then have to confirm that its support is in order to become a professional and independent organization of the main goals and objectives of Homeland Security (Kamdagri) enabling the frame of the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia), because of that as a paramilitary unit, Brimob relative has a cruising range wider than other police units. This paper argues that the Brimob role in securing the 2014 election influenced by four things: the POLRI headquarters policy, readiness internally Brimob, the level of coordination, and how much excess escalation election of 2014. This paper also argued that obstacles and challenges that are likely a part of response to internal and external reality that can be reduced in intensity by reference to the level of success of the Brimob to carry out roles and functions to perform articulation of the role and function optimally.

Keywords: Polri, Brimob, Pemilu 2014, Konflik

I. Pendahuluan

Sebagai bagian integral dari Polri, Brigade Mobile Polri (selanjutnya Brimob) terlibat aktif dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang dibuat oleh Polri, termasuk kebijakan tentang pengamanan Pemilu 2014. Keinginan pimpinan Polri untuk berkontribusi positif dalam pensuksesan hajat politik limat tahunan tersebut merupakan bagian komitmen pada setidaknya dua hal, yakni: Pertama, mengimplementasikan peran dan fungsi Polri sebagai instrumen utama dalam Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) mempertegas bahwa memastikan pelaksanaan Pemilu 2014 berlangsung aman, jujur dan adil tanpa ada kecurangan adalah bagain dari bingkai perpolisan demokratik yang profesional. Kedua, langkah tersebut juga diyakini sebagai pembuktian bahwa dalam prosesnya Polri ingin mempertegas sebagai institusi keamanan yang netral dan tidak berpihak dan menguntungkan salah satu partai politik atau kontestan. Hal tersebut tergambar dan terdeskripsikan dalam setiap pernyataan kapolri dan sejumlah petinggi Polri lainnya di berbagai tingkatan.

• Pernah Disampaikan pada Rakernis Korbrimob Polri Tahun 2014 "Korp Brimob Polri Siap Melaksanakan Pengamanan Pemilu 2014". Diselenggarakan pada 27-29 November 2013 oleh Korp Brimob Polri. Gd. Satya Haprabu, Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok. Untuk Kepentingan penerbitan Jurnal ini, artikel ini telah dimutakhirkan data dan dan analisisnya.

♦ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pasca Sarjana FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung. Mengajar juga di Program Pasca Sarjana Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta.

Kebijakan petinggi Polri tersebut sesungguhnya menggambarkan bahwa Polri sebagai institusi ingin diposisikan sebagai bagian dari aset bangsa bersama dengan institusi lainnya. Isu yang merebak berkaitan dengan kinerja Polri yang mengarah negatif, yang salah satunya hampir menegasikan Polri sebagai aset bangsa adalah polemik penggunaan hijab oleh Polwan dalam seragam Polri. [1] hal tersebut pula yang mempertegas bahwa keberadaan Polri harus tetap menjadi polisi yang profesional dan menjadi aset bangsa. Momentum Pemilu 2014 ini dijadikan oleh Polri sebagai langkah untuk mempertegas bahwa Polri tetap independen dan netral untuk dukung mendukung salah satu fgur dan partai politik. Pengalaman tiga kali pemilu selama Orde Reformasi ini menggambarkan bagaimana Polri terbawa alur saling dukung mendukung dan terjebak oleh kepentingan elit dan pragmatisme oknum petinggi Polri.

Brimob sebagai bagian dari Polri kemudian harus mempertegas bahwa dukungan Brimob agar Polri profesional dan independen menjadi target dan tujuan utama penyelenggaraan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang kondusif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai unit paramiliter, Brimob relatif memiliki daya jelajah yang lebih luas dari unit kepolisian lainnya. dengan pembatasan pada penanganan kejahatan berintensitas tinggi, maka Brimob pada konteks pengamanan Pemilu 2014 lebih banyak memosisikan sebagai bagian dari penegakan hukum dari pada menjalankan peran dan fungsi preemtif dan preventif, yang mana banyak dilakukan oleh unit kepolisian lain di Polri. jikapun kemudian Brimob menjalakan fungsi kepolisian pada umumnya, namun hal tersebut bukan menjadi bagian utama dari peran dan fungsi Brimob yang fokus pada penanganan gangguan Kamtibmas berkadar tinggi.

Tulisan ini berargumen bahwa peran Brimob dalam penanganan Pemilu 2014 sangat dipengaruhi oleh empat hal, yakni: kebijakan mabes Polri, kesiapan Brimob secara internal, tingkat koordinasi, dan seberapa besar eskalasi ekses pelaksanaan Pemilu 2014. Tulisan ini juga memosisikan bahwa kendala dan tantangan cenderung merupakan bagian dari respon internal dan realitas eksternal yang dapat diperkecil intensitasnya dengan mengacu pada tingkat keberhasilan Brimob dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan melakukan artikulasi atas peran dan fungsinya secara optimal.

II. Brimob dan Perpolisian Demokratik

Brimob sebagai Police Paramilitary Unit (PPU) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsepsi kepolisian modern. Sebagai salah satu kesatuan istimewa polisi PPU lebih banyak memainkan perannya sebagai bagian dari unit yang menggunakan pola operasional dan teknologi persenjataan militer.[2] Membedakan antara unit kepolisian yang lain dengan PPU terletak pada pemanfaatan persenjataan yang lebih berat dibandingkan dengan unit kepolisian lainnya. Bahkan PPU memiliki jargon sebagai "heavy

---

[1] mnmnmnm

[2]Lihat Peter. B. Kraska. 1994. "Enjoying Militarism: "Political/Personal Dilemmas in Studying US Police Paramilitary Units" Justice Quarterly 13.. pp. 406-407

weapons units", [3] dengan menggunakan persenjataan berat tersebutlah kemudian Weisenhorn,[4] Gibson[5],dan Nadelman[6] secara tegas menyatakan bahwa keberadaan PPU dalam institusi kepolisian membuat lembaga tersebut kelihatan lebih menampakan wajah yang tidak seutuhnya sipil. Meski begitu, kesamaan antara PPU dan militer secara gamblang Nadelman digambarkan sebagai berikut:

> Perhaps the most striking feature of the modern epoch is the homogeneity of forms of physical coercion. Armed forces, police forces, paramilitary around the world make use of the same military technology…. With the help of advisors and training courses, forms command, patterns of operations, methods of recruitment also bear a global resemblance. For the first time in history, soldiers and policeman from different societies have more in common with each other than the societies from which they come.[7]

Sedangkan Kraska lebih menekankan bahwa tanpa PPU pun sesungguhnya institusi polisi mampu menjadi apa saja, sebagai alat keamanan. Kehadiran PPU dalam institusi kepolisian hanya akan meneruskan dominasi militer atas kepolisian. Karenanya keberadaan PPU sesungguhnya membuat dominasi militer atas kepolisian menjadi makin langgeng.

> "*As military dominance and jurisdiction are achieved in emerging government, authorities consolidate their position by instituting a system in which internal control is accomplished by the process of policing instead of the more costly, more overt, and less efficient one of military control*"[8]

Namun demikian, secara praktik operasional PPU memang diposisikan sebagai satuan pamungkas dalam berbagai hal terkait dengan tugas kepolisian yang membutuhkan upaya penyelesaian secara cepat dengan pendekatan yang lebih disesuaikan dengan intensitas kejahatan yang berkembang dimasyarakat. Di sinilah yang kemudian membuat PPU menjadi salah satu unit yang berbeda dengan unit-unit kepolisian lainnya.

PPU pada praktiknya memiliki berbagai model. Model PPU yang biasa dianut oleh banyak Negara menyesuaikan dengan budaya dan karakteristik

---

[3] Berbagai persenjataan berat yang digunakan PPU, see. Peter B. Kraska. And Victor E. Kappeler. *Ibid.* Pp. 3

[4] Lihat Donald J. Weisenhorn. "Military Model" in Bayley. William G. (ed) *The Encyclopedia of Police Science*. New York: Garland. Pp.421

[5] Lihat Gibson. James W.Warriors of Dream: Manhood in Post-Vietnam America.New York: Hill and Wang.

[6] Lihat Nadelman. Ethan A. 1993. *Cops Across Borders:The Internationalization of US Criminal Law Enforcement*. University Park:The Pennsylvania State University Press.

[7] Nadelman. Ethan A. *ibid.* pp. 22

[8] Peter B. Kraska. And Victor E. Kappeler. *Op.cit*. pp. 3

politik Negara dan masyarakat, serta bekas penjajahnya[9]. Beberapa Negara merujuk kepada model Gendarmerie Nationale, yang dipraktikkan di Perancis, Bundesgrenzschutz Special Group (BGS) yang kemudian dikenal BGS-9, Carabinieri Corps yang dipraktikkan di Italia, Royal Constabulary di Inggeris, *Koninklijke Marechaussee* di Belanda dan model SWAT di Amerika Serikat. Model PPU ini sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri, tergantung juga pada fungsinya. Di Perancis misalnya Gendarmerie Nationale berada di bawah di bawah Departemen Pertahanan, dan difungsikan pada Departemen Dalam Negeri, Carabieneri berada dibawah control Departemen Pertahanan dengan difungsikan pada kepolisian nasional, namun komandan dari Carabieneri tetap dipegang oleh jenderal bintang dua angkatan darat. Sedangkan BGS-9 sepenuh berada di bawah kepolisian federal Jerman, praktik yang berbeda dengan di Belanda berada dibawah Departemen Pertahanan, dengan tersebar di semua regional distrik yang ada di Belanda. Inggris sedikit banyak memiliki karakteristik dengan menempatkan Royal Constabulary-nya disesuaikan dengan daerah dan wilayahnya, bahkan tak jarang juga menggunakan penamaan etnik tertentu sebagai bagian dari upaya untuk membangun sentiment kewilayahan dan keetnikan.[10]

Sementara itu tugas dan fungsi PPU di beberapa Negara juga bervariasi, ada yang menjadi penjaga perbatasan, pemadaman konflik dan separatisme, mencegah dari aksi terorisme, menjaga keluarga kerajaan dan pejabat Negara, hingga bencana alam. Pada prinsipnya, PPU cenderung mennjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi,di mana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi. Pola pendekatan antara praktik kepolisian modern dengan operasional militer menjadi ciri khas dari PPU, selain alasan penggunakan persenjatan berat dan praktik operasional kemiliteran.

Keterkaitan antara Democratic Policing dengan PPU setidaknya ada tiga hal, sebab Democratic Policing adalah bagian dari praktik perpolisian modern, dan PPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan peran dan fungsinya,baik secara langsung berada di bawah control kepolisian, maupun departemen atau kementerian lainnya. Karena prinsipnya adalah menjalankan peran kepolisian secara substantive. Adapun keterkaitan antara keduanya adalah sebagai berikut: Pertama, prinsip Democratic Policing yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah akuntabilitas dari praktik perpolisian kepada otoritas politik dan masyarakat. Pertanggungjawaban kepolisian tersebut secara kelembagaan menjadi satu keharusan bagi institusi kepolisian kepada masyarakat. Dan kinerja kepolisian,dalam konteks PPU, merupakan langkah agar PPU secara kelembagaan maupun personil juga memiliki kewajiban untuk selalu mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat,terlepasapakah PPU

---

[9] Penjelasan tentang hal ini silakan lihat Arnold. David.1976. "*Law in Order": Observations on the Policing of Colonial Ireland and India*. Adelaide: Flinders University.

[10] Lihat Cynthia H.Enloe. "Police and Military in Ulster:Peace Keeping or Peace-subverting Forces?Journal of Peace Research, Vol. 15, No. 3 (1978). pp. 243-244

tersebut berada di bawah kepolisian langsung,ataupun di bawah departemen lain yang kemudian mensubsitusikan peran operasionalisasinya kepada institusi kepolisian.

Kedua, adanya pengawasan dan control terhadap praktik PPU khususnya dan kepolisian umumnya dari masyarakat. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara berlapis,dari mulai masyarakat, parlemen atau eksekutif, kementerian ataupun kepolisian nasional atau federal, hingga pada perwira di lapangan dari PPU. Pengawasan dan control terhadap kinerja kepolisian ini adalah instrumen dari praktik perpolisian modern dan demokratik. Institusi kepolisian ataupun PPU tidak lagi semaunya menjalankan tugas dan fungsinya,sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh kepolisian di Negara-negara otoriter.

Ketiga, keterkaitan yang paling utama dan harus digarisbawahi antara Demokratik Policing dengan PPU adalah penegakan HAM. Prasyarat utama operasional dari Perpolisian Demokratik dan PPU adalah tegaknya HAM masyarakat. Dalam pengertian bahwa setiap menjalankan tugasnya PPU harus benar-benar memperhatikan hak-hak sipil dan HAM mereka, meski secara kelembagaan sudah ditegaskan bahwa PPU menjalankan peran dan fungsi yang istimewa dalam merespon kejahatan tingkat tinggi, yang membutuhkan pendekatan operasional militeristik dan sangat dekat dengan kemungkinan melakukan tindak kekerasan.

Kedua konsep tersebut secara teoretik coba diaplikasikan dalam melihat dinamika internal Brimob Polri. Dengan berbagai pola dan prasyarat tersebut diatas, apakah Brimob Polri sebagai salah satu kesatuan istimewa di Polri mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam koridor Demokratik Policing, setidaknya dalam tiga irisan antara Perpolisian Demokratik dengan PPU tersebut di atas. Peran Brimob dalam pengamanan Pemilu adalah bagain dari upaya menjaga jarak dari aktivitas politik yang tidak berkorealsi dengan peran dan fungsi Brimob secara utuh. Sebab, keberadaan Brimob adalah bagain dari aktor keamanan yang memastikan hajat politik lima tahunan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan dan upaya pembelokkan dari hasil Pemilu. Hal tersebut tentu saja menjadi taruhan bagi Brimob, apakah Polri kembali terjerumus dalam pragmatisme politik atau beranjak pada tingkatan yang lebih fokus dan profesional, menjadi institusi yang mandiri dan efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya secara profesional.

III. Ancaman Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2014

Pelaksanaan Pemilu 2014 harus dilihat sebagai bagian dari implementasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. berkaca pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, keberadaan aktor keamanan cenderung tidak netral dan menjadi berpihak pada salah satu calon presiden dan atau partai politik terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 punya potensi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, dan menjadikan aktor keamanan sebagai bagian dari operator untuk

melakukan hal tersebut. dalam praktiknya ada tiga aktor keamanan, yakni Polri, di mana Brimob ada didalamnya, TNI, dan juga BIN yang secara kasat mata melakukan pengamanan agar pelaksanaan Pemilu 2014 dapat berjalan dengn baik. komitmen tersebut kerap kali dicederai oleh ambisi dan keinginan tertentu agar dapat mengerek daya tawar politik untuk mendapatkan posisi tertentu sebagai bagian dari imbalan memenangkan calon dan partai tertentu.

Ada lima hal yang melatarbelakangi Pemilu dapat berjalan tidak sesuai dengan harapan, yakni: Pertama, budaya politik masyarakat yang berkembang. Praktik politik terbuka yang selama ini dipraktikkan membangun persepsi dan memperkuat pragmatisme karena sistem yang terbangun mengarah pada politik transaksional. Sehingga persepsi publik berkaitan dengan dinamika politik yang ada mengarah pada penguatan budaya politik yang tidak berbasis pada kesadaran politik yang komprehensif.

Kedua, transisi demokrasi yang selama ini berjalan cenderung tersendat dan terinterupsi oleh kepentingan segelintir oknum elit politik. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi bagian dari sebab transisi demokrasi berjalan melambat dan terhambat. Setelah lima belas tahun transisi demokrasi, langkah untuk menyudahi transisi demokrasi untuk melangkah ke level yang lebih baik sanagta tergantung pada hasil Pemilu 2014 ini.

Ketiga, Mengacu pada masa lalu, netralitas aktor keamanan dan pemerintah serta praktik penghalalan segala cara untuk menang menjadi bagian dari rujukan praktik yang sama pada Pemilu 2014 mendatang. Keberadaan aktor keamanan dan praktik penyimpangan cenderung berpihak manakala internal dari institusi keamanan tersebut cenderung mengarah kepada kepentingan pragmatis dan personal. Sebagaimana yang terjadi pada tiga pelaksanaan Pemilu terakhir.

Keempat, ancaman terbesar dari penyelenggaraan Pemilu 2014 adalah netralitas aktor keamanan. Memastikan agar aktor keamanan tetap netral adalah bagian dari upaya menjaga agar penyelenggaraan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik dan memastikan akan menghasilkan kepemimpinan politik yang baik dan membawa Indonesia pada level yang lebih tinggi dari kondisi saat ini.

Dan kelima, permasalahan politik transaksional dalam bentuk mutual benefit memastikan bahwa proses politik yang tengah berlangsung menjadikan keberadaan Pemilu 2014 menjadi momentum yang harus dikawal dan diamankan agar tidak terseret oleh arus kepentingan transaksional yang negatif. Selama ini pesta demokrasi akan selalu memunculak figur-figur yang mengambil keuntungan dari praktik politik selama ini. sebagaimana hukum ekonomi, keberadaan transaksi politik hanya akan menjadikan pesta demokrasi lima tahunan kehilangan makna dan tujuan.

Berkaca pada latar belakang tersebut di atas, maka peran dan fungsi Polri dan Brimob dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2014 dilakukan dengan cara pre emtif, preventif, maupun penegakan hukum.

Khusus untuk Brimob, titik tekannya ada pada bentuk-bentuk penegakan hukum yang merupakan bagian dari ekses negatif dari penyelenggaraan Pemilu 2014.

Mengacu pada penjelasan tersebut diatas, ada delapan hal yang mengancam pelaksanaan Pemilu 2014, yakni: Pertama, terjadinya manipulasi dan kecurangan penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut makin besar peluangnya ketika momentum Pemilu 2014 adalah kesempatan terakhir bagi sejumlah elit politik dan partai politik yang kehilangan orientasi ideologinya. Situasi ini menjadi penegas bahwa praktik kecurangan dan manipulasi hasil kepemiluan mengarah kepada sejauhmana pengamanan dan pemastian dari penyelenggaraan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik.

Kedua, selain memunculkan sikap pragmatisme di publik, penyelenggaraan Pemilu 2014 juga bagian dari unjuk politik Golput, dan tidak memilih. Hal ini disebabkan karena praktik kepemiluan danggap tidak memberikan harapan baru, maka golongan putih menjadi pilihan, dengan dalih tidak memilih adalah pilihan.

Ketiga, bentrok massa dan anarkisme. Pada hal ketiga ini telah memasuki fase ekses dari penyelenggaraan Pemilu , yang mana bentrok antara pendukung dan aksi sabotase telah terjadi dan digerakkan untuk pemenangan dan tuntutan untuk klaim atas pemenangan.

Keempat, menduduki obyek vital, baik obyek vital terkait dengan penyelenggaraan pemilu, maupun obyek vital yang tidak terkai dengan praktik kepemiluan.

Kelima, konflik komunal, upaya untuk membangun sentimen keetnisan dan agama mengarah kepada meluasnya konflik komunal.

Keenam, langkah lain yang kemudian diidentifikasikan adalag sabotasi. Sabotase ini salah satunya mengarah kepada aksi pemogokan dan menghentikan aktivitas publik.

Ketujuh, ancaman bom. Menimbulkan keresahan publik adalah dengan memberikan ancaman bom dan kekuatiran publik dalam bentuk yang konkret ataupun hanya sekedar ancaman.

Dan kedelapan, aksi terorisme yang memanfaatkan momentum Pemilu 2014 membuat penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut menjadi penting untuk diamankan dari segala bentuk ancaman, termasuk aksi terorisme.

IV. Kendala dan Tantangan

Dengan menggunakan sembilan indikator dalam menilai sejauhmana kesiapan Brimob dalam mengefektifkan peran dan fungsinya dalam pengamanan Pemilu 2014 didapat skor bahwa Brimob secara institusi siap dan diprediksi akan sukses dan berhasil. Penilaian tersebut skala pointnya adalah 0 hingga 1. Skor akan diberikan angka 1 apabila dalam salah satu indikator tersebut dianggap berhasil dan atau terus melakukan pernaikan dan pembenahan. Sedangkan skor 0.5 diberikan apabila masih terdapat kecenderungan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangannya, meski telah dilakukan berbagai upaya dari internal. Total skor Brimb dapat sukses

dalam menjalankan perannya dalam pengamanan Pemilu 2014 adalah skor 7, dan Brimob dalam penilaian saya mencapai angka 7.5, yang berarti secara institusi Brimob akan berhasil dalam menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan tetap dalam koridor netralitas (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Indikator Penilaian Brimob Polri terkait dengan Kesiapan dalam Pengamanan Pemilu 2014

No.	Indikator	Skor	Keterangan
1.	Tali Komando	1	Brimob sebagai Paramiliter
2.	Penggunaan Pendekatan nir-Kekerasan	0.5	Masih Memiliki kelemahan dan cenderung berulang
3.	Sebaran Personil	1	Relatif Merata & Fokus pada Peran & Fungsi
4.	Skill & Penguasaan Medan	1	Menyesuaikan dengan kualifikasi Personil Brimob & karakter kewilayahaan
5.	Implementasi Perpolisian Demokratik	1	Masih terus mengupayakan pengimplementasiannya.
6.	Struktur Kelembagaan	1	Telah Menyesuaikan dengan Struktur Polri tanpa kehilangan esensi keorganisasian
7.	Punishment & Rewards	1	Berjalan efektif dan menimbulkan efek jera
8.	Interaksi Internal	0.5	Masih terpisah dengan Polisi Umum, ada upaya
9.	Rekruitmen Personil	0.5	-
Total Skor		7.5	

Namun demikian masih ada kendala dan tantangan yang harus diperhatikan dan direspon secara aktif agar peran Brimob dalam pengamanan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik dan efektif. Ada enam kendala yang masih harus dijadikan konsern Brimob dalam menjalan perannya dalam pengamanan Pemilu, yakni: Pertama, masih dilakukannya praktik kekerasan dan interaksi internal yang terbatas. Pada konteks ini pendekatan praktik kekerasan dan interkasi internal dengan unit lain masih menjadi kendala yang pada derajat tertentu harus dianggap sebagai bagian dari ancaman atas pengefektifan peran Brimob.

Kedua, karena pengamanan Pemilu 2014 bukan hanya Brimob yang akan mengamankan, maka koordinasi dengan instansi lain semisal TNI, BIN, dan atau Pemda dan lainnya menjadi penting untuk dilakukan. kecenderungan permasalahan koordinasi akan menjadi kendala yang serius bagi Brimob.

Ketiga, sulitnya koordinasi dengan antar institusi tersebut salah satunya disebabkan karena masih menguatnya ego sektoral dan jiwa korsa. Kendala ini juga ditandai dengan keyakinan berlebihan atas kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing institusi.

Keempat, selain dua hal tersebut juga dikarenakan adanya duplikasi peran dan fungsi antar institusi yang terlibat. Duplikasi ini pada derajat tertentu akan meningkatkan adrenalin negatif dalam praktik pengamanan Pemilu 2014.

Kelima, adanya gradasi dan sebaran ekses Pemilu yang cenderung meluas. Hal ini mengarah pada kesulitan dan lamanya personil menuju lokasi yang diidentifikasikan sebagai kendala yang serius.

Keenam, gradasi dan sebaran ekses menyulitkan mobilitas personil menuju lokasi yang dituju. Hal ini pada tingkatan tertentu akan memberikan ekses konflik yang meluas.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi Brimob dalam pengamanan Pemilu 2014 tersebut memiliki empat tantangan, yakni: Pertama, karakteristik ekses dari penyelenggaraan Pemilu 2014. Selain dalam bentuk teror, diyakini juga bahwa karakteristik eksesnya akan cenderung mengarah pada perluasan konflik dan varian-varian yang ada.

Kedua, bentuk dan koordinasi operasionalisasi pengamanan bersama. Dengan berbasis pada legalitas dan pengalaman yang ada. Keberadaan koordinasi antar lembaga mengacu pada sejauhmana masing-masing institusi dapat memahami batasan dan kewenangan yang dimiliki.

Ketiga, dukungan peralatan dalam bentuk Alkom dan Jarkom yang efektif. Termasuk di dalamnya pengamanan diri yang harus selalu ada dan tersedia.

Dan keempat, tantangan yang relatif serius adalah luasnya cakupan wilayah yang harus diamankan. Situasi tersebut secara prinsip seharusnya dapat ditanggulangi dengan menggandeng dan bekerja sama dengan Pemda dan atau perusahaan transportasi dan sebagainya untuk dapat menjangkau daerah dengan baik.

V. Penutup

Mengacu pada uraian tersebut, maka menjadi penting bagi Brimob untuk memperkuat eksistensinya dengan menjalankan peran dan fungsinya secara aktif dan proporsional dalam bentuk yang lebih konkret dan profesional. Pengamanan Pemilu 2014 juga mengandung tiga konsekuensi mempertegas posisi institusi induk sebagai kepolisian yang profesional dan mandiri, juga penguatan serta pengefektifan perarn Brimob diasumsikan juga penegasan akan semangat untuk berkontribusi positif atas perjalan bangsa dan negara ini menuju level yang lebih baik. Sedangkan konsekuensi yang ketiga mengacu pada apa yang menjadi konsern dan karakteristik Brimob sendiri sebagai institusi yang fokus pada ganguan Kamtibmas berkadar tinggi.